

GARUT PADA MASA PEMERINTAHAN PENDUDUKAN JEPANG (1942-1945)

Kunto Sofianto

Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Padjadjaran
Email: ksofianto@yahoo.com

ABSTRAK Penelitian ini membahas masuknya Pasukan Jepang ke Garut, keadaan pemerintahan dan kehidupan politik, pendidikan dan sosial budaya, kehidupan sosial ekonomi, berita proklamasi kemerdekaan RI 1945, dan Sikap Tentara Jepang. Tujuan umum penelitian ini untuk merekonstruksi dan menganalisis Pendudukan Tentara Jepang di Kota Garut (1942-1945). Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui lebih jelas latar belakang Pendudukan Tentara Jepang dan sepek terjangnya selama menduduki Kota Garut. Sumber-sumber yang digunakan, terutama buku-buku, surat kabar pada masa Pendudukan Tentara Jepang di Indonesia, dan arsip. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Untuk menganalisis tentang pendudukan Tentara Jepang di Kota Garut, penulis juga menggunakan bantuan dari ilmu sosial lainnya, terutama ilmu politik, sosiologi, psikologi, dan antropologi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintahan pendudukan Jepang di Kota Garut, salah satunya dilatarbelakangi oleh ambisi pemerintah Kekaisaran Jepang, terutama untuk menguasai wilayah Asia Tenggara. Dapat diketahui bahwa meskipun Pemerintahan Pendudukan Jepang berlangsung selama tiga setengah tahun, namun masyarakat Garut sangat menderita lahir dan batin karena pada masa itu Pemerintahan Pendudukan Jepang sangat kejam dan menguras sumber daya alam, serta sumber daya manusianya. Pada awalnya, masyarakat Garut sangat menyambut dan menerima Tentara Jepang untuk membebaskan mereka dari penjajahan Kolonial Belanda. Namun, pada akhirnya masyarakat Garut pun menyadari bahwa penjajahan Tentara Jepang lebih buruk dan kejam daripada penjajahan Kolonial Belanda. Ibarat pepatah mengatakan “keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya”.

Kata Kunci: Tentara Jepang, Kota Garut

ABSTRACT This study discusses the coming of Japanese Army to Garut, government situation and politics, education and socio-cultural, socio-economic life, news of the proclamation of Indonesia's independence in 1945, and the attitude of the Japanese Army. The general objective of this study is to reconstruct and analyze the Japanese Occupation Army in Garut City (1942-1945). Through this study is expected to determine more clearly the background of the Occupation Japanese Army and their behavior during the occupation in Garut city. The sources are used, especially books, newspapers during the Japanese Occupation Army in Indonesia, and archives. The method used in this study is historical method that consists of four steps, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. To analyze about the Japanese Occupation Army in Garut city, the author also uses the help of other social sciences, particularly political science, sociology, psychology, and anthropology. Conclusion of this study shows that the occupation of the Japanese Government in Garut city, one of which is motivated by the ambition of the Royal Government of Japan, particularly for controlling of Southeast Asia region. It can be found that although the Occupation of Japanese Government lasted for three and a half years, but Garut people suffered both physically and spiritually because at that time the Japanese Government Occupation was very cruel and deplete natural resources, and human resources. At first, Garut people welcomed and accepted the Japanese Army very much to liberate them from the Dutch colonial occupation. In the end, however, Garut people were aware that the Japanese Government occupation much worse and cruel than the Dutch colonial occupation. Like the proverb says that “out of the tiger's mouth into a crocodile's mouth”.

Key Words: Japanese Army, Garut City

PENDAHULUAN

Hingga saat ini, sejarah Kota Garut pada masa pendudukan Tentara Jepang (1942-1945) belum banyak diperhatikan oleh para ahli ilmu sosial umumnya dan para ahli sejarah khususnya. Tulisan sejarah mengenai Kota Garut secara khusus yang berkenaan dengan pendudukan Tentara Jepang dapat dikatakan tidak ada. Tulisan-tulisan mengenai Kota Garut sebelum kemerdekaan Republik Indonesia (RI) 1945 secara umum banyak berkenaan dengan sejarah Kota Garut pada masa kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Kolonial Belanda keadaan Kota Garut sangat nyaman untuk ditempati. Pada masa itu, Kota

Garut dikenal dengan julukan “*Swiss van Java*” dan kemudian karena keindahannya dijuluki juga dengan nama “*mooi Garut*” (Garut yang permai). Orang Garut atau orang Priangan pada umumnya menyebut kota Garut dengan istilah “Garut Pangirutan” (Garut Pemikat)

Pada masa Pemerintah Kolonial Belanda, di daerah Garut mulai sekitar abad ke-19 dibuka daerah-daerah perkebunan (teh, karet, dan kina) milik para pengusaha swasta Belanda, Inggris, Italia, Jerman, dan Cina. Perkebunan-perkebunan itu terdapat di daerah Garut Selatan, yaitu Cisurupan, Pakenjeng, Cikajang, Cisompet, Cikelet, dan Pameungpeuk.

Pembukaan daerah-daerah perkebunan tadi diikuti pula oleh pembangunan hotel di Kota Garut dan daerah sekitarnya. (1917) sebagai sarana tempat menginap dan hiburan bagi para pengusaha perkebunan atau para wisatawan (terutama dari mancanegara). Hotel-hotel yang ada di Kota Garut yaitu Hotel Papandayan, Hotel Vila Dolce, Hotel Belvedere, dan Hotel Van Hengel. Di luar Kota Garut yaitu Hotel Ngamplang di Cilawu, Hotel Cisoeroepan di Cisarupan, Hotel Melaju di Tarogong, Hotel Bagendit di Banyuresmi, Hotel Kamodjang di Samarang, dan Hotel Cilaut Eureun di Pameungpeuk (Drissen, 1983: 12-13).

Selain tempat rekreasi di daerah perkebunan yang sering dikunjungi oleh para wisatawan, baik dalam maupun luar negeri, juga tempat-tempat lainnya dibuka untuk tempat pariwisata. Tempat-tempat itu adalah Kawah Papandayan, Kawah Kamojang, Kawah Manuk, Kawah Telaga Bodas, Situ Bagendit, Situ Canguang, Cipanas (tempat pemandian air panas), Gunung Cikuray, Gunung Guntur, dan Pantai Pameungpeuk. Berita tentang indahnya Kota Garut yang tersebar dari teman ke teman, dari keluarga ke keluarga, atau dari satu negeri ke negeri yang lainnya menjadikan Kota Garut dan daerah Garut sebagai tempat pariwisata terkenal di dunia. Para wisatawan mancanegara yang datang ke Kota Garut pada masa itu, yakni dari Amerika, Inggris, Australia, Belanda, dan Jepang. Orang penting dan terkenal yang pernah datang ke Kota Garut adalah Raja Leopold dan Permaisurinya Astrid, bintang film Charlie Chaplin menginap di Hotel Ngamplang, Renate Muller, dan Hans Albers. Kemudian, Susuhunan Pakubuwono X juga pernah mengunjungi Kota Garut dan menginap di Hotel Papandayan (Drissen, 1983: 12-13).

Pada masa Pemerintahan Pendudukan Tentara Jepang keindahan di Garut mulai nampak tidak nyaman karena Pemerintah Pendudukan Tentara Jepang tidak memperhatikan keindahan dan kenyamanan kota. Semua sumber daya manusia dan alam dicurahkan guna menyokong Pemerintahan Tentara Jepang untuk melawan sekutu dan membangun Asia Timur Raya. Keadaan Kota Garut pada masa Pendudukan Tentara Jepang sangat menarik untuk diteliti karena sejak zaman Pendudukan Tentara Jepang hingga sekarang masyarakat kota Garut sangat sulit untuk bangkit dari berbagai keterperukan.

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini secara garis besarnya dilakukan melalui empat tahap, yakni heuristik (pengumpulan data), kritik, interpretasi (pengolahan dan penyaringan sumber), dan historiografi atau penyusunan tulisan (Notosusanto, 1978: 10-12).

Dalam tahap heuristik, penulis mengumpulkan sumber tertulis yang terdiri dari buku-buku, arsip-arsip, dan artikel-artikel dalam surat khabar dan majalah. Pengumpulan sumber tersebut dilakukan dengan cara studi kepustakaan di berbagai tempat, terutama di Jakarta, Bandung, dan Garut. Di Jakarta, yaitu di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Perpustakaan Nasional. Di Bandung, yaitu di

perpustakaan milik pribadi penulis dan Perpustakaan Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Unpad. Di Garut, yaitu di perpustakaan dan Arsip Kabupaten Garut. Selain itu, penulis juga melakukan kerja lapangan atau peninjauan ke lokasi penelitian di Kota Garut.

Dalam tahap kritik, penulis mengolah dan menguji sumber-sumber yang terkumpul secara bertahap melalui kritik ekstern (pengujian sumber bendanya) dan kritik intern (pengujian isi sumbernya) untuk menentukan apakah informasi yang terkandung dalam sumber itu dapat dipercaya sebagai data sejarah atau tidak. Sumber-sumber yang telah disaring dan dapat dipercaya diambil, dikumpulkan, dan disusun dalam kartu data.

Dalam tahap interpretasi, data-data yang telah terkumpul ditafsirkan maknanya dalam konteks masalah yang sedang diteliti sehingga menghasilkan fakta sejarah yang diperlukan guna merekonstruksi Garut pada Masa Pemerintahan Pendudukan Jepang dalam rentangan waktu lebih kurang tiga tahun (1942-1945). Fakta-fakta yang telah disusun secara sistematis itu, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan dan bantuan dari ilmu-ilmu sosial yang erat hubungannya dengan ilmu sejarah, terutama ilmu politik, sosiologi, dan antropologi. Dalam tahap historiografi, hasil analisis dari fakta-fakta itu kemudian penulis susun dalam bentuk penulisan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka memenuhi ambisinya untuk men-yatukan Asia di bawah pimpinan Jepang, secara tiba-tiba dan mendadak pada 7 Desember 1941, pasukan udara Jepang melancarkan serangan ke pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii. Sejak kejadian itu, Amerika Serikat dan sekutunya menyatakan perang terhadap Jepang. Demikian pula Belanda sebagai salah satu negara sekutu Amerika Serikat juga menyatakan perang terhadap Jepang. Pada 18 Desember 1941, pukul 06.30, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer melalui radio menyatakan perang terhadap Jepang (Onghokham, 1989: 165).

Setelah mengadakan penyerbuan secara besar-besaran di Kalimantan dan Serawak, Sumatera, Ambon, Sulawesi, Bali, Timor dan Kupang, pasukan Jepang di bawah komando Staf Tentara ke-16 dan Divisi II menyerbu Jawa Barat. Mereka mendarat pada 1 Maret 1942 di daerah Banten (Teluk Banten) dan Eretan Wetan (Cirebon). Pasukan yang mendarat di Eretan Wetan adalah Detasemen Syoji. Pada saat itu satu detasemen pimpinan Kolonel Tosyinari Syoji yang berkekuatan 5.000 prajurit secara khusus ditugasi untuk merebut kota Bandung. Pada hari itu juga Batalyon Wakamatsu dapat merebut lapangan terbang Kalijati (Subang) tanpa perlawanan berarti dari angkatan Udara Inggris yang menjaga lapangan terbang itu (Salim, 1971: 103-104). Pada 5 Maret 1942

seluruh detasemen tentara Jepang yang ada di Kalijati disiapkan untuk menggempur pertahanan Belanda di Ciater dan selanjutnya menyerbu Bandung. Akibat gempuran Tentara Jepang, tentara kolonial Belanda yang berada di Ciater mundur ke Lembang. Akan tetapi, pada 7 Maret 1942 di sore hari, pasukan Jepang mendesak tentara Belanda sehingga Lembang sebagai benteng pertahanan Belanda terakhir jatuh ke tangan tentara Jepang (Notosusanto, *et al.*, 1970: 88-89).

Pada 6 Maret 1942, Panglima Angkatan Darat Belanda, Letnan Jenderal Ter Poorten memerintahkan komandan pertahanan Bandung Mayor Jend. J.J. Pesman agar tidak mengadakan pertempuran di Bandung dan menyarankan mengadakan perundingan mengenai penyerahan pasukan yang berada di antara garis Utara-Selatan yang melalui Purwakarta, melalui Purwakarta, dan Sumedang (Notosusanto, *et al.*, 1970: 88-89). Jenderal Ter Poorten berpendapat bahwa Bandung saat itu padat oleh penduduk sipil, wanita, dan anak-anak, dan apabila terjadi pertempuran dipastikan banyak yang akan menjadi korban (Kartodirdjo *et al.*, 1977: 4). Oleh karena desakan tentara Jepang yang sangat kuat pada perundingan di Kalijati, Subang (8 Maret 1942) maka Belanda menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang. Hal itu disiarkan dalam siaran radio Bandung pada 9 Maret 1942 pukul 08.00. Dalam siaran itu, terdengar perintah Jenderal Ter Poorten pada seluruh pasukannya untuk menghentikan segala perlawanan dan menyerah tanpa syarat kepada Tentara Pendudukan Jepang (Djajusman, 1978: 220).

Setelah penyerahan kekuasaan dari Pemerintah Kolonial Belanda kepada Pemerintah Militer Jepang, tentara Jepang mulai memasuki Kota Bandung, mereka masuk dari arah Lembang dan Sumedang dengan berjalan kaki. Di sepanjang jalan rakyat Kota Bandung menyambut tentara Jepang dengan "banzai". Masyarakat Kota Bandung menyambut kedatangan tentara Jepang dengan penuh kegembiraan, karena tentara Jepang dianggap sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa Indonesia dari cengkraman penjajahan Belanda.

Hal yang menarik bagi rakyat Jawa Barat khususnya adalah gencarnya propaganda Tentara Jepang di Indonesia melalui radio yang berisi antara lain, janji-janji muluk tentang kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Siaran radio Jepang juga selalu disertai dengan lagu *Indonesia Raya*, ciptaan Wage Rudolf Supratman, padahal sebelumnya pemerintah kolonial Belanda melarang keras lagu itu diperdengarkan di seluruh Indonesia. Sementara itu, di beberapa kota di Indonesia, termasuk di Jawa Barat, barang-barang buatan Jepang dijual dengan harga murah (Djajusman, 1978: 3). Pemasaran harga barang yang murah itu dilakukan oleh Pemerintah Pendudukan Tentara Jepang untuk menarik hati rakyat Jawa Barat khususnya.

Setelah Lembang sebagai benteng terakhir Belanda jatuh ke tangan tentara Jepang pada 7 Maret 1942 maka praktis Kota Bandung pun dapat dikuasai oleh tentara Jepang. Kemudian sekitar pertengahan bulan Maret tentara Jepang memasuki Kota Garut melalui Stasiun Cibat, Stasiun Garut,

dan melalui jalan raya Tarogong dengan memakai kendaraan bermotor, sepeda dan bejalan kaki. Kedatangan Tentara Jepang tersebut disambut oleh rakyat Garut dengan penuh suka-cita. Pada mulanya mereka berkumpul di sekitar Pengkolan (di depan Toko Ek bouw dan Mie Hoa), kemudian mereka menempati tempat-tempat yang strategis, yakni hotel Papandayan (sekarang ditempati Kodim dan Bank BNI 1946) yang ditempati oleh para perwira tentara Jepang, *Normaal School* (sekarang ditempati markas Korem 062 Tarumanegara) yang dijadikan tangsi militer dan tempat *interniran* (tawanan), Cipanas dijadikan tempat untuk peristirahatan atau merawat orang-orang Jepang yang sakit, dan Hotel Ngamplang dijadikan tempat kediaman orang-orang Jepang sipil. Orang-orang Jepang sipil di kalangan masyarakat Garut dikenal dengan nama Jepang *Sakura*, karena mereka sering menggunakan lencana pada kemejanya berupa bunga Sakura (Sofianto, 2001: 66). Setelah Tentara Pendudukan Jepang menguasai Kota Garut, kemudian mereka mengambil alih semua instansi, perusahaan, dan perkebunan milik Belanda, baik yang ada di dalam maupun di luar Kota Garut.

Perlu diketahui pula bahwa sejak zaman kolonial Belanda telah ada beberapa orang Jepang yang tinggal di Kota Garut dan di luar Kota Garut, yakni di Cikajang. Orang yang tinggal di Kota Garut membuka usaha Toko Tokyo (sekarang ditempati Toko Cahaya Baru) di Jl. Telaga Bodas (sekarang Jl. A Yani), Toko Mitsuring (di belokan Pasar Ceplak), dan perusahaan bus, kayu dan ikan di pinggir Mesjid Wakaf (sekarang ditempati oleh Tepbek) di Jl. Grote Weg (sekarang Jl. Ciledug), sedangkan di luar Kota Garut bekerja sebagai petani kentang. Perusahaan bus (*Autobus Dienst Satoh* atau Bus SH), kayu, dan ikan (yang diangkut dari daerah Pamengpeuk) tersebut dikelola oleh Satoh. Sesudah Tentara Jepang menduduki Indonesia dapat diketahui diketahui bahwa mereka sebenarnya adalah tentara yang bertugas sebagai mata-mata untuk mengetahui keadaan di daerah Garut. Mata-mata tersebut dipimpin oleh seorang kepala intelejen bernama (Satoh (menurut masyarakat seorang jenderal), yang pada masa sebelumnya berpura-pura sebagai pengusaha angkutan bus, kayu, dan perikanan (Sofianto, 2001: 67).

Untuk mencegah kekosongan dalam pemerintahan di wilayah kekuasaan Tentara Jepang, ditentukan dalam pasal 3 *Osamu Seirei* (UU Osamu) 1942 No. 1 bahwa semua badan pemerintahan yang terdahulu (masa Pemerintah Hindia Belanda) tetap berlaku untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Tentara Jepang (Gie, 1968: 26). Dengan adanya UU tersebut Pemerintah Tentara Jepang masih mengakui dan menggunakan struktur pemerintahan tradisional yang istilah-istilahnya diganti dengan bahasa Jepang. Muh. Moesa Suriakarta Legawa sebagai bupati (*Kenco*) Garut tetap diberi wewenang untuk mengurus rakyatnya atas pengawasan Pemerintah Tentara Jepang. Demikian pula para pemimpin di bawah *Kenco* seperti *Gunco*

(wedana), *Sonco* (camat), dan *Kuco* (kepala desa) tetap diakui kekuasaan atas daerahnya untuk menjaga kestabilan pemerintahan. Pemerintah Tentara Jepang mengharapkan bahwa dengan menggunakan struktur pemerintahan tradisional, mereka tetap akan membantu Jepang dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya dan mempermudah komunikasi antar pemimpin dengan rakyat yang nantinya berfungsi sebagai alat propaganda pemerintahan Tentara Jepang.

Setelah berlakunya UU No. 27 tentang aturan pemerintah daerah dan UU No. 28 tentang aturan pemerintah *Syu* dan *Tokubetsusyi* maka susunan pemerintah daerah yang berlaku pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda terdiri dewan perwakilan rakyat daerah (*regentschap/stadgemeente raad*), dewan pemerintah daerah (*college van burgemeester en wethouders*), dan kepala daerah (*regent/burgemeester*). Pada masa Pemerintahan Tentara Jepang, pemerintah daerah di tingkat *Ken* (kabupaten) hanya terdiri dari kepala daerah, yaitu *Kenco* (bupati). Dihapusnya badan-badan tersebut disesuaikan dengan keadaan Pemerintah Tentara Jepang yang menghendaki serba cepat dalam berbagai urusan pemerintahan pada masa itu (Soejito, 1976: 111).

Dalam pasal 1 dan pasal 2 Osamu Seirei No. 13 tanggal 29 April 1943, ditentukan bahwa *Ken* boleh mengadakan *Zyoorei* (peraturan tentang pekerjaan *Ken*), di antaranya tentang cara membuat dan mengenakan pajak, uang sewa, upah, uang wajib, dan mengawasi harta benda *Ken*. Namun dalam prakteknya peraturan-peraturan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena pada masa itu yang menonjol hanya Pemerintahan Tentara Jepang yang mencurahkan perhatiannya untuk Perang Asia Timur Raya. Oleh karena itulah pada 1944 *Kenco* Garut Muh. Moesa Suriakarta Legawa “menentang” berbagai kebijakan Pemerintah Tentara Jepang. Akibatnya ia diturunkan dari jabatan *Kenco* dan dijadikan tahanan rumah oleh Jepang. Sebagai gantinya diangkatlah patihnya R.T. Endung Suriaputra (1944-1945). Akan tetapi, ia menjabat bupati tidak lama karena beberapa bulan kemudian, masih pada 1945, tanpa alasan yang jelas ia diganti oleh Rd. Kalih Wiriamihardja (Sofianto, 2001: 69).

Perubahan sosial politik mulai dirasakan oleh masyarakat Garut setelah Pemerintahan Tentara Jepang berkuasa beberapa bulan. Sikap orang-orang Jepang yang semula ramah dan simpatik, berubah sikap menjadi angkuh dan menekan masyarakat Garut dengan berbagai peraturan yang sangat mengekang kebebasan. Berbagai peraturan yang harus ditaati antara lain penghormatan bendera Jepang *Hinomaru*, keharusan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Jepang *Kimigayo*, terutama bagi para pejabat dan pegawai, melakukan upacara makuto, yakni upacara mengheningkan cipta, *seikerei*, yakni memberi hormat setiap pagi kepada Kaisar Jepang *Tenno Heika* dengan cara menundukkan kepala ke arah Tokyo, ibukota Kekaisaran Jepang, larangan untuk

mengibarkan bendera merah-putih, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebagai gantinya penduduk harus mengibarkan bendera Hinomaru, terutama semua instansi di Kota Garut dan di luar Kota Garut.

Penduduk yang mempunyai pesawat radio harus disegel untuk mencegah masyarakat Garut mendengarkan berita-berita mengenai perkembangan dunia, seperti berita yang menyangkut kekalahan tentara Jepang oleh Sekutu. Berita-berita negatif mengenai kedudukan tentara Jepang dalam perang sangat dirahasiakan, maksudnya agar tidak mempengaruhi masyarakat Kota Garut. Di Alun-alun dan di setiap belokan jalan, seperti Jl. Mandalagiri dan Jl. Guntur, di perempatan Maktal, di Gedong Jangkung, di depan markas Kempetai (Hotel Papandayan) dipasang pesawat-pesawat radio umum yang selalu menyiarkan propaganda kemenangan-kemenangan tentara Jepang dalam peperangan.

Di antara peraturan-peraturan di atas, yang paling ditentang oleh umat Islam pada umumnya adalah kewajiban melakukan *seikerei* atau bersikap membungkuk ke Negeri Jepang untuk memberi hormat kepada Kaisar Jepang yang dianggap sebagai Dewa Matahari. Alasan para ulama untuk menentang peraturan itu adalah karena sikap tersebut identik dengan sikap *rukuk* pada waktu umat Islam melakukan sembahyang (Benda, 1980: 155-156).

Selain peraturan tersebut, juga setiap orang harus menghormat dengan cara membungkuk (*kirei*) kepada para tentara Jepang yang sedang melakukan tugas jaga di depan Toko Mie Hoa, di depan markas Kempetai (Hotel Papandayan), di Alun-alun, atau di mana dan kapan saja. Orang yang sedang menaiki sepeda pun harus turun dulu dan langsung memberi hormat. Kalau melanggar peraturan dikenakan hukuman berat, yaitu ditampar, ditendang, atau dijemu di bawah terik matahari. Melihat gelagat tentara Jepang yang semakin brutal dan kejam, masyarakat Garut berusaha untuk menghindari jalan-jalan yang selalu dijaga oleh tentara Jepang (Sofianto, 2001: 70).

Dalam hubungannya dengan sistem pemerintahan, berbagai usaha yang dilakukan dalam menjamin keamanan dan kepentingan politik Jepang, pada 1943 di Garut dibentuk organisasi-organisasi semi-militer dan militer yang dipersiapkan untuk tenaga bantuan dalam perang Asia Timur Raya, seperti *Heiho* (pembantu prajurit) bermarkas di Hotel Papandayan (sama dengan markas Kempetai), *Keibodan* (Pembantu polisi) di Tepbek, dan *Seinendan* (barisan pemuda) di Gedung *Societeit Intra Montes*. Persyaratan untuk menjadi anggota *Heiho* ialah para pemuda yang berbadan sehat, berkelakuan baik dan berumur antara 18 – 25 tahun. Para anggota *Heiho* diberi latihan militer secara penuh, seperti cara menggunakan senjata, membela diri, dan mengemudi kendaraan. Salah seorang pemuda Garut yang diangkat sebagai pelatih *Heiho* adalah Didi Sudarman. Persyaratan untuk menjadi anggota *Seinendan* diberikan juga latihan-latihan militer, baik untuk mempertahankan diri maupun untuk penyerangan. Pimpinan *Seinendan* di Kota Garut adalah Didi. Secara resmi pembentukan *Seinendan*

bertujuan untuk mendidik dan melatih para pemuda agar mampu menjaga dan mempertahankan tanah air. Namun, maksud yang sebenarnya adalah sebagai tenaga cadangan untuk memperkuat Tentara Jepang (Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1990: 29). Persyaratan untuk menjadi anggota *Keibodan* ialah para pemuda berusia antara 20-35 tahun, berbadan sehat, kuat, dan berkelakuan baik. Para anggota *Keibodan* diberi latihan-latihan tugas kepolisian, seperti penjagaan lalu-lintas, pengamanan, dan pengawasan desa. Pimpinan *Keibodan* di Kota Garut ialah Suryana (Sofianto, 2001: 71).

Di kalangan orang Cina pun dibentuk *Keibodan* (*kakyo keibotai*) yang anggotanya terdiri dari Liauw Tjeng Kang, Lie Tjoen Wie, Tan Pung Hoej, Tan Hok Lian, Oej Tong San, Tjan Biauwa, Tan Oen Lok, Tjan Biauwa Kin, Tan Ngo Hoej, Tan Seng Thoej, Lau Wie Tjang, Tan Kim Tong, Tan P Hin, Liao Thiang Thoej, dan Yo Liang Kie. Pada 24 Juli 1945 mereka berlatih di Jl. Menado No. 9 Bandung. Namun, mereka hanya beberapa minggu di Bandung karena setelah Proklamasi Kemerdekaan RI 1945 mereka kembali ke Garut (*Catatan Harian Yo Liang Kie Tahun 1942-1945*).

Selain itu, di kalangan orang Cina juga dibentuk organisasi *Chung Hwa Hwee* yang ketuanya bernama Ting Kun Lim dan tempatnya (sekretariat) di Jl. Ciledug (sekarang dipakai PKPN). Tujuan utama Pemerintah Tentara Jepang menginstruksikan pendirian organisasi Cina tersebut adalah untuk mempermudah koordinasi orang-orang Cina guna kelancaran pemungutan pajak dan sumbangan yang sangat diperlukan oleh Pemerintah Tentara Jepang untuk biaya perang.

Pada awal 1944, setelah kedudukan Balatentara Jepang terdesak akibat serangan-serangan balik tentara sekutu, Pemerintah Tentara Jepang menganggap perlu dibentuk barisan belakang yang tangguh sebagai pendukung tentara Jepang di garis depan. Jepang berusaha menjadikan seluruh wilayah yang didudukinya sebagai benteng pertahanan, yaitu seluruh penduduk beserta segala potensinya dikerahkan untuk turut serta di dalam usaha peperangan melawan tentara Sekutu. Maksud tersebut diwujudkan awal 1944 berupa pembentukan organisasi sosial baru yang diorganisir oleh pemerintah tingkat paling rendah. Organisasi sosial tersebut dinamai *tonarigumi* yang kemudian dikenal hingga sekarang dengan sebutan Rukun Tetangga (RT) (Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, 1993: 361). Setiap kepala keluarga memilih seorang ketua untuk *tonarigumi*-nya. Ketua *tonarigumi* (ketua RT) yang disebut *Kumicho* mengepalai sekitar 15-20 keluarga. Di Kota Garut terdapat 280 *tonarigumi*, dan setiap *Kumicho* membawahi sekitar 15 – 20 keluarga atau lebih (Sofianto, 2001: 72).

Dengan sistem itu, tak seorang pun yang tidak terdaftar dalam *tonarigumi*. Setiap kepala rumah tangga diwajibkan melaporkan setiap pendatang yang menginap di rumahnya kepada *Kumicho* dan secara berkala *Kumicho* melaporkan keluar masuk penduduk dalam wilayah kekuasaannya kepada *Kuco* (kepala desa). Dengan sistem itu Pemerintah Tentara Jepang

berhasil menciptakan kontrol yang sangat efektif dan juga kegunaannya terasa sangat cepat. Pengawasan terhadap bahan makanan dan kebutuhan rakyat berjalan lancar, demikian juga pengawasan terhadap kewajiban *romusha* dan keamanan setempat. Dengan sistem itu, Pemerintah Tentara Jepang berhasil mencegah kemungkinan penyusupan tentara Sekutu (Asmadi, 1985: 36). Secara otomatis, adanya *tonarigumi* itu, wilayah Garut pun dapat terawasi dengan baik.

Setelah Tentara Jepang dapat mengontrol daerah Garut secara penuh, pemerintah Pendudukan Tentara Jepang membubarkan sekolah-sekolah yang ada di Kota Garut, yang merupakan “warisan” dari masa pemerintahan Kolonial Belanda, seperti ELS, HIS, CHICS, dan *Volkshool* dibubarkan. Baru sekitar akhir April 1942, sekolah-sekolah tersebut dibuka kembali dan dijadikan Sekolah Rakyat (*Kokumin Gakko*). Lama pendidikan di sekolah itu enam tahun dan lokasinya pun sama seperti pada masa pemerintahan Kolonial Belanda. Kemudian sekitar September 1942 dibuka sekolah Menengah Tingkat Pertama (*Syoto Chugakko*) dibuka di Jl. Bank. Semua sekolah dasar memiliki derajat yang sama, tidak ada diskriminasi. Penghapusan diskriminasi tersebut besar sekali manfaatnya bagi masyarakat Garut karena dengan demikian semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan tanpa membedakan status sosial.

Pada masa itu di Garut khususnya, tidak ada sekolah tingkat Taman Kanak-kanak (TK). Alasannya, mungkin Pemerintah Tentara Jepang menganggap bahwa anak-anak di bawah umur kurang efektif untuk dijadikan alat propaganda Jepang. Selain itu, mereka tidak akan kuat menerima latihan-latihan berat semi militer yang dilakukan setiap hari di sekolah. Dasar pendidikan di setiap sekolah-sekolah sangat dipengaruhi oleh semangat militer dan tujuannya diarahkan untuk mengabdikan kepada Pemerintah Pendudukan Tentara Jepang. Pada masa itu suasana pendidikan diliputi oleh suasana perang sehingga banyak nyanyian, semboyan, serta berbagai latihan militer dihubungkan dengan persiapan untuk menghadapi perang melawan tentara Sekutu. Dengan semboyan “Asia Timur Raya untuk kemakmuran bersama” maka semangat Jepang pun atau “*Japanisasi*” ditanamkan sejak dini melalui sekolah-sekolah. Pada masa itu, waktu untuk masuk sekolah dimulai pada pukul 08.30 dan berakhir pada pukul 15.00 waktu Tokyo. Setiap pelajar laki-laki diwajibkan mencukur gondul kepalanya dan memakai topi yang bentuk depannya mirip topi serdadu Jepang, tetapi belakangnya tidak panjang. Dalam menanamkan semangat Jepang tersebut berbagai upacara harus dilaksanakan oleh para pelajar, di antaranya upacara bendera, menghormati Tenno Heika (*seikerei*), mengheningkan cipta (*mokuto*), upacara sumpah pelajar, dan senam (*taiso*).

Larangan keras mempeggunakan bahasa Belanda diberlakukan di mana dan kapan saja, dan dalam berbagai lapangan. Siapa saja yang berani melanggar akan mendapat hukuman berat, bahkan dapat dituduh sebagai mata-mata musuh. Kalau dianggap sebagai mata-mata musuh maka hukumannya ialah hukuman

mati. Risiko pelanggaran itu sangat berat sehingga kebanyakan orang tidak berani melanggarnya. Sebagai penggantinya, bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar di semua sekolah. Semua buku yang berbahasa Belanda diganti dengan buku-buku terjemahan dalam bahasa Indonesia. Di samping itu, di Garut diajarkan pula bahasa Sunda dan juga sebagai bahasa pengantar sampai kelas dua *Kokumin Gakko* (Sekolah Rakyat). Baru setelah kelas tiga dan selanjutnya, bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar.

Pemerintah Tentara Jepang sangat mendorong para pelajar untuk mempelajari bahasa Jepang yang masih asing sama sekali bagi telinga penduduk. Pelajaran bahasa Jepang, berupahuruf Jepang *katakana* dan *hiragana*, mulai diajarkan di kelas empat, sedangkan huruf *kanji*, diperkenalkan di kelas enam. Para pegawai pemerintah pun diwajibkan mempelajari bahasa Jepang, yang nantinya dihubungkan dengan peningkatan gaji dan karir mereka. Untuk maksud tersebut Pemerintah Tentara Jepang membuka kursus bahasa Jepang secara gratis di gedung *Societeit Intra Motes*. Banyak masyarakat Kota Garut yang mengikuti kursus tersebut dan banyak pula yang mahir menggunakan bahasa Jepang. Salah seorang yang pandai menggunakan bahasa Jepang dan menjadi juru bahasa Jepang adalah Ahmad Komar dari Kampung Galumpit. Selain Ahmad Komar, penduduk Garut yang lulus mengikuti kemahiran bahasa Jepang tingkat ke-2, yang diadakan padatanggal 18, bulan ke-3, tahun *Syoowa* 20, yaitu M. Empran Senjaja, Soekiran, Joesoef, Abdoelah Djoemantapradja, Balnadi Soetadipoera, Hawadi, dan Lay Tek Lie (*Kampo* No. 67, tahun ke IV, Bulan 5-2605: 35).

Sesungguhnya tujuan utama Pemerintah Tentara Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda dan menganjurkan untuk memajukan bahasa Indonesia, melainkan pertimbangan praktis dan memudahkan komunikasi antara pemerintah dan rakyat (Sagimun, 1985: 29). Meskipun kehidupan masyarakat Kota Garut terasa berat di segala bidang, namun ada segi-segi yang menguntungkan dalam bidang kebudayaan, diantaranya makin berkembangnya budaya dan kesenian daerah, bahasa Sunda sebagai bahasa daerah, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Di samping itu, masyarakat Garut pun mengenal juga bahasa Jepang, seni beladiri Jepang (semacam *yudo*), dan seni musik Jepang yang terutama diperkenalkan melalui sekolah-sekolah. Lagu Jepang yang sudah dihapal oleh masyarakat Kota Garut, terutama para pelajarnya adalah lagu kebangsaan Jepang *Kimigayo*.

Hal yang masih berhubungan dengan kepercayaan masyarakat Kota Garut umumnya adalah adanya ramalan Jayabaya, seorang Raja Daha yang memerintah dari tahun 1051-1062, yang menyatakan bahwa suatu saat akan datang orang-orang *katai* dari Utara yang berkulit kuning dan

bermata sipit untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan orang kulit putih. Pemerintahan orang-orang katai itu hanya seumur jagung saj, sesudah itu barulah kemerdekaan Indonesia akan tercapai. Orang-orang *katai* yang datang dari Utaraitu kemudian diidentifikasi sebagai orang Jepang.

Dengan adanya ramalan tersebut masyarakat Garut pun tadinya menyambut kedatangan tentara Jepang dianggap sebagai pembebas dari penjajahan Belanda, terlebih lagi bahwa Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Akan tetapi setelah beberapa bulan berkuasa, tentara Jepang tersebut menampakkan kekejaman dan kebengisannya. Masyarakat Kota Garut pun hanya bisa bersabar sambil menduga-duga ramalan tersebut. Halyang menjadi tanda tanya dari ramalan Jayabaya tersebut adalah kata "hanya seumur jagung". Pertama kali menduga 3½ bulan, tetapi sesudah lewat waktunya tetap saja bangsa kulit kuning itu bercokol di Indonesia. Kemudian masyarakat pun menduga 3½ tahun, 35 tahun, atau 350 tahun. Namun masyarakat pun mempunyai keyakinan bahwa Pendudukan Tentara Jepang tersebut antara 3½ tahun atau 35 tahun, karena 350 tahun terlalu lama. Akhirnya setelah Jepang menyerah kepada Sekutu dan kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, masyarakat pun menyadari bahwa kata "seumur jagung" tersebut adalah 3½ tahun.

Sesudah mengalami kekalahan terus menerus di wilayah Pasifik, tentara Jepang menghadapi berbagai kesukaran, bukan saja dalam pertempuran di garis depan, melainkan juga kesukaran untuk memenuhi kebutuhan personal militer dan logistik. Untuk mengatasi hal itu, Tentara Pendudukan Jepang berusaha merekrut penduduk dan menguras sumber daya alam dari daerah-daerah pendudukannya. Di wilayah Garut, Pemerintah Tentara Jepang mengerahkan segala kegiatan ekonomi untuk kepentingan perang. Melalui unit-unit desa terkecil, rakyat diwajibkan mengumpulkan hasil bumi di antaranya padi, jagung dan buah-buahan. Para petani yang sebelumnya bebas menanam apa saja di tanah garapannya, harus menanam tanaman yang sesuai dengan ketentuan penguasa Jepang, dan hasilnya harus diserahkan untuk kepentingan peperangan. Tanah-tanah kosong di Kota Garut (seperti di Cigarut, sekarang ditempati SLTP I, II, dan IV) harus ditanami pohon Kaliki (pohon Jarak). Selain di Kota Garut, pohon Jarak banyak ditanam di luar Kota Garut, yaitu di daerah Cidatar, Limbangan, Cibatu, dan sebagainya. Menurut penduduk, biji dari pohon Jarak mengandung minyak pelicin yang dapat digunakan untuk menjalankan mesin-mesin kendaraan tentara Jepang yang sedang bertempur, sedangkan daunnya (selain daun Murbey) digunakan untuk makanan ulat sutera yang pengolahannya atau penenunannya terdapat di gedung Malayu di Jl. Samarang. Setiap halaman rumah penduduk harus dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan pangan, seperti singkong, ubi, dan talas (Sofianto, 2001: 74). Para penduduk yang mampu diminta sukarela atau secara paksa untuk menyumbangkan perhiasan berupa emas, perak, intan dan berlian untuk keperluan

peperangan. Selama Pendudukan Tentara Jepang, masyarakat Garut tidak saja menderita lahir, tetapi juga batin.

Selain barang-barang di atas, para penduduk yang memiliki kendaraan bermotor, baik roda dua atau empat harus diserahkan kepada penguasa Tentara Jepang. Tiang-tiang besi hiasan di pusat kota (sekitar Pengkolan) dan berbagai besi tua lainnya harus pula diserahkan dan dikumpulkan di Alun-alun. Barang-barang tersebut, dalam waktu singkat serta tidak diketahui oleh penduduk segera menghilang dari Alun-alun. Biasanya, apabila akan mengangkut barang yang telah terkumpul, Pemerintah Tentara Jepang membunyikan sirine pada malam hari sebagai tanda bahaya serangan udara Sekutu, dimana para penduduk harus bersembunyi di lubang-lubang yang telah disediakan sambil menggigit karet. Padahal, sebenarnya orang-orang Jepang tersebut sedang mengangkut kekayaan dari Garut (Sofianto, 2001: 74). Akibat tindakan Pemerintah Tentara Jepang tersebut, kehidupan ekonomi penduduk Kota Garut menjadi sengsara. Untuk Memperoleh makanan pokok, para penduduk harus memiliki “kartu” dari kepala desa, kemudian ditukarkan dengan beras atau jagung (kualitas yang rendah) di desanya masing-masing, serta harus antri berjam-jam mendapatkan giliran. Untuk mengatasi kesulitan bahan makanan, terpaksa penduduk makan umbi-umbian, seperti *hui* (ubi jalar), *sampeu* (ketela pohon), *taleus* (talas), dan bahkan ada yang memakan *bodogol cau* (batang pokok pohon pisang). Oleh karena persediaan pangan sangat kurang, banyak penduduk Kota Garut yang menderita kelaparan, kekurangan gizi, terkena penyakit kolera dan malaria yang sering mengakibatkan korban jiwa. Lain lagi dengan orang-orang Cina yang berusaha untuk mengatasi kelaparan, yaitu dengan membuat bubur nasi agar persediaan makanan tidak cepat habis. Demikian pula orang-orang Arab dan Pakistan melakukan penghematan persediaan makanan agar tidak mengalami kelaparan.

Selain sulit memperoleh bahan pangan, masyarakat Garut sulit memperoleh bahan sandang karena bahan itu sejak 1943 menghilang dari pasaran. Penduduk yang tidak mampu membeli bahan sandang pada masa itu memakai *kadut* (karung goni). Jenis pakaian itu hampir merata dipakai di mana-mana, terutama oleh penduduk di luar Kota Garut, bahkan penduduk Kota Garut pun banyak yang memakainya. Dengan semakin meningkatnya pemakaian karung goni, bahan itu pun sulit diperoleh di pasaran, dan kalaupun tersedia harganya mahal. Oleh karena langkanya karung goni maka penduduk terpaksa memakai karet lembaran sebagai pakaian sehari-hari dan bahan ini pun menjadi barang dagangan yang laris. Karet lembaran yang telah dihias banyak didatangkan dari Tasikmalaya. Oleh karena masyarakat memakai pakaian yang tidak sehat maka celana menjadi sarang *tuma* (semacam kutu busuk) yang sering menimbulkan *borok* akibat gigitannya ataupun akibat lekatnya pakaian karet dengan kulit tubuh pemakai. Kekurangan bahan sandang dan pangan itu banyak

diderita oleh masyarakat bumiputra saja. Orang-orang Cina, Arab, dan Pakistan tidak mengalami seperti masyarakat bumiputra, artinya mereka masih tetap berpakaian dan makan sewajarnya meskipun dalam keadaan kekurangan.

Selain mengurus sumber daya alam di daerah Garut, juga Pemerintah Tentara Jepang mengurus sumberdaya manusia. Penduduk diwajibkan *romusha* (kerja paksa) guna membantu berbagai kepentingan serdadu Jepang di medan pertempuran. Para pekerja *romusha* itu diperintahkan melalui kepala desa untuk dipekerjakan di Cilampeni (daerah Bandung Selatan) untuk membangun lapangan terbang. untuk membuat gua-gua pertahanan militer di Ngamplang, Pameungpeuk, di daerah Bandung, dan Cilacap. Penduduk Garut pun ada yang dipekerjakandi Cikotok di pertambangan emas, dan di Banten untuk pembuatan jalan kereta api dari Saketi ke Bayah. Para *romusha* dari Garut selain dikirim ke daerah-daerah di sekitar Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, juga ada yang dikirim ke luar negeri seperti ke Myanmar, Thailand, dan Vietnam.

Para *romusha* diperas habis-habisan, sementara kesejahteraannya sama sekali tidak diperhatikan. Mereka disuruh bekerja tanpa mengenal batas waktu dan ditempatkan di bedeng-bedeng kecil yang tidak berdinding dan hanya beratapkan daun *kirai* (sejenis Enau atau Aren) sebagai penahan hujan atau sengatan matahari. Pakaian mereka compang-camping dan ransum pun sangat terbatas. Akibat tindakan para tentara Jepang yang di luar batas perikemanusiaan tersebut, beratus-ratus bahkan beribu-ribu *romusha* dari daerah Garut meninggal di tempat kerja atau dibunuh setelah mengerjakan pertahanan militer yang dirahasiakan.

Tindakan Pemerintah Tentara Jepang menambah berat beban hidup masyarakat, khususnya bagi para *romusha* karena keadaan ekonomi sudah sangat berat, yakni langkanya bahan kebutuhan primer (sandang dan pangan), kemudian ditambah adanya kewajiban kerja paksa di luar batas kemanusiaan. Ironisnya para *romusha* tersebut oleh para propagandis Jepang diberi julukan yang muluk-muluk, seperti *prajurit pekerja*, *pahlawan ekonomi*, dan *pahlawan pekerja*, yang melaksanakan tugas suci mengabdikan kepada Perang Asia Timur Raya (Sagimun M.D, dkk. 1985: 51).

Meskipun kehidupan penduduk Kota Garut menjadi sengsara, namun tidak seorang pun yang berani menentang kekejaman tentara Jepang tersebut karena semua orang takut dan ngeri berhubungan dengan *Kempetai*. *Kempetai* mudah sekali menangkap orang yang salah ucap atau sekedar orang yang dicurigai, lebih-lebih kalau dituduh sebagai mata-mata musuh, bisa dihukum mati. Setiap orang yang dipanggil oleh *Kempetai* di markasnya Hotel Papandayan akan memperoleh siksaan di luar batas perikemanusiaan. Untuk memperoleh pengakuan, tidak segan-segan melakukan berbagai penyiksaan yang sangat mengerikan, seperti diinjak dengan kaki meja atau kursi, disayat-sayat dengan bayonet atau samurai kemudian disiram air garam, dipukul, atau dijemur di bawah terik matahari, bahkan ada yang

disiksa hingga menemui ajal. Hanya keajaiban bisa selamat dalam keadaan utuh. Kalaupun bisa keluar jiwa dan mentalnya terganggu.

Kegiatan *Kempetai* semakin meningkat di daerah Garut terutama setelah adanya perlawanan K.H. Zainal Mustapa terhadap Pemerintah Tentara Jepang di Sukamanah, Singaparna Kabupaten Tasik-malaya pada 25 Februari 1944. *Kempetai* sering mengawasi dan meminta keterangan secara langsung dari para kiyai di Kota Garut tentang kegiatannya, kalau-kalau ada hubungan dengan perlawanan di Sukamanah. Halyang paling dikhawatirkan oleh Pemerintah Tentara Jepang adalah adanya perlawanan serupa di Kota Garut seperti di Sukamanah (A. Wahid, 1995: 37-38).

Kerja wajib romusha itu tidak dikenakan kepada penduduk Timur Asing, yakni kepada orang Cina, Arab, dan Pakistan. Sebagai gantinya mereka yang sudah berumur 16 tahun ke atas diwajibkan membayar uang sebesar Rp. 100,00 setiap tiga bulang atau tidak ditentukan. Surat keterangan pembayaran tersebut harus selalu dibawa ke mana pun pergi sebagai bukti bahwa mereka bersumpah setia kepada Pemerintah Tentara Jepang dan sudah terdaftar sebagai bangsa asing (*Surat keterangan pembayaran dan penduduk pemerintah Tentara Nippon tanggal 17 Mei 1942*).

Untuk keperluan memelihara “semangat bertempur” di kalangan sipil dan tentara Jepang, mereka memelihara “wanita penghibur” (*jugun ianfu*), yang ditempatkan di tempat-tempat kediaman sipil atau perwira militer, seperti di Hotel Papandayan, gedung Societeit Intra Montes, Hotel Ngamplang, dan komplek *Garut Shoku Kusyo* (GSK). Selain memelihara “wanita penghibur”, para serdadu Jepang tersebut tidak segan-segan untuk mengambil istri orang lain, baik secara halus maupun kasar, dengan istilah “meminjam”. Kelakuan di luar batas kemanusiaan para tentara Jepang tersebut dapat diketahui juga oleh masyarakat dengan ditemukannya *kondom* di sekitar tempat-tempat tersebut.

Akibat berbagai aktivitas masyarakat ditujukan untuk kepentingan perang tentara Jepang maka keadaan Kota Garut yang sebelumnya ramai sebagai kota pariwisata dan pusat perdagangan maka sejak 1943 menjadi sepi. Aktivitas ekonomi sangat lesu karena umumnya pasar-pasar tutup. Selain itu juga sebagian besar toko tutup karena tidak ada barang dan daya beli masyarakat sangat rendah. Pemandangan yang nampak hanya anak-anak sekolah yang berangkat pada pagi hari dan pulang pada siang hari. Rasa sunyi dan sepi nampak sekali pada malam hari karena para penduduk dilarang menyalakan lampu, dan sebagai penggantinya hanya menggunakan *cempor* (lentera) yang nyalanya sangat redup dan kecil sekali (Sofianto, 2001: 79).

Toko-toko orang Cina yang pada masa Kolonial Belanda menjadi leveransir pun, seperti Toko Ek Bouw, Toko Batavia, Toko Khoe Pek Goan, dan toko milik Joe Si Eng di Cibodas Cikajang, sering tutup karena barang-barangnya harus diserahkan kepada Pemerintah Tentara Jepang. Demikian pula Toko

Bandung, milik Yo Hong Gan yang menjual berbagai bahan sandang sering tutup, karena tidak ada pembeli dan barang-barangnya sering diminta secara paksa oleh tentara Jepang. Para tentara Jepang tersebut dengan seenaknya mengambil beras dan tembakau di gudang milik Joe Si Eng (Sofianto, 2001: 79).

Pemerintah Tentara Jepang pun berusaha melanjutkan usaha, sebagaimana telah dirintis Pemerintahan Kolonial Belanda. Usaha itu seperti pemintalan sutera di Gedung Malayu di Samarang, mengumpulkan berbagai bahan bangunan, dan mengambil ikan dari Pameungpeuk yang dikumpulkan di Tepbek. Di samping mengambil ikan juga dimaksudkan untuk membenahi pertahanan tentara Jepang di Pantai Pameungpeuk apabila mendapat serangan dari tentara Sekutu. Selain usaha-usaha di atas, orang-orang Jepang Sakura (sebagai pimpinan dan staf) mengelola perkebunan-perkebunan di luar Kota Garut peninggalan Pemerintahan Kolonial Belanda. Di Kota Garut, orang-orang Jepang Sakura, selain mengisi berbagai instansi, juga ikut mengelola Preanger Bont Weverij, yang namanya diganti menjadi Garut *Shoku Kusho* (GSK atau Pabrik Tenun Garut).

Orang-orang Jepang Sakura yang bekerja di pabrik GSK berjumlah 30 orang di bawah pimpinan Matsumoto. Untuk membantu perang Jepang pabrik tenun tersebut mempekerjakan buruh sebanyak 5.000 orang berasal dari Kota Garut dan luar Kota Garut, dan didatangkan mesin pemintalan Jantra dari Semarang Jawa Tengah (Sofianto, 2001: 80). Upah pekerja dalam seminggu hanya Rp. 2,25.00. Itulah sebabnya para pekerja sering mencuri benang yang harganya Rp. 2.00. Maksud mereka mencuri, hanya untuk biaya makan agar keesokan harinya dapat bekerja kembali. Apabila kedapatan mencuri dikenakan hukuman berat, yakni dijemur di bawah terik matahari (di atas atap seng) sambil membawa ember berisi air, dipukuli atau ditendang. Para pekerja yang ditampar atau dipukul bukan kedapatan mencuri saja, melainkan juga kesalahan sedikit dalam pekerjaan pasti kena bentakkan, pukulan, atau tendangan (*Buana Minggu*, edisi 24 Maret 1985). GSK memproduksi berbagai perlengkapan tentara Jepang, seperti pakaian, celana, topi, dan ransel. Oleh karena produksinya hanya bagi keperluan tentara Jepang maka keuntungan dan kesejahteraan bagi para pekerja tidak ada.

Pada 1944 pasukan sekutu terus maju dan mengarah untuk menyerang negeri Jepang. Jalur gerakan pasukan Sekutu itu melalui wilayah bagian timur Indonesia menuju ke Filipina (Nasution, 1977: 181). Gerakan pasukan sekutu itu mengkhawatirkan pemerintah Jepang, baik yang ada di negeri Jepang maupun di berbagai wilayah pendudukannya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dalam situasi seperti itu, kepercayaan masyarakat Indonesia umumnya terhadap Jepang semakin berkurang. Masyarakat merasakan sendiri bagaimana tindak-tanduk Tentara Jepang yang semakin bengis. Masyarakat yang tadinya menaruh harapan kepada Tentara Jepang sebagai penyelamat dari penjajahan Belanda, kenyataannya

malah lebih terasa kejam. Keadaan ekonomi rakyat semakin sengsara karena semua potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia diarahkan secara paksa oleh Tentara Pendudukan Jepang untuk membantu perang Tentara Jepang melawan sekutu. Berbagai gerakan protes banyak dilakukan, namun tidak bersifat frontal.

Gejolak rakyat Indonesia dan berbagai gerakan yang bersifat politik sangat mengkhawatirkan Pemerintah Pendudukan Jepang. Agar bangsa Indonesia tetap sudi membantu Tentara Jepang maka Pemerintah Jepang di negeri Sakura berjanji untuk memerdekakan Indonesia di kelak kemudian hari. Janji itu diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koso dalam sidang parlemen Jepang pada 7 September 1944. Pernyataan politik kemudian ditindaklanjuti oleh *Saiko Shikikan* di Jakarta dengan memerintahkan Dewan Pertimbangan Pusat (*Chuo Sangi In*) untuk bersidang guna membicarakan pernyataan di atas.

Adanya janji itu, tentu saja, masyarakat menyambutnya dengan penuh antusias. Masyarakat Jakarta menyambut Janji Jepang itu dengan rapat umum yang diadakan di lapangan Ikada dengan diisi oleh pidato Bung Karno dan beberapa orang pemimpin *Jawa Hokokai*. Sejak saat itu lagu "*Indonesia Raya*" diperbolehkan untuk dinyanyikan dan bendera Merah Putih pun boleh dikibarkan bersama dengan bendera Jepang *Hinomaru* (Ekadjati, *et al.*, 1980/1981: 54-55).

Untuk mewujudkan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakici Harada sebagai pemimpin tertinggi Pemerintah Militer Jepang di Pulau Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (*Dokoritzu Junbi Cosakai*), diketuai oleh KRT Radjiman Wediodiningrat dengan anggota 60 orang. Badan itu, kemudian menjadi Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Kewajiban yang paling utama dari badan tersebut adalah menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan rencana kemerdekaan Indonesia, di mana hasilnya harus dilaporkan kepada *Gunseikan* (*Kan Po* No. 66, Th. Ke-4, 2605/1945). Pada 7 Agustus 1945 Pemerintah Pendudukan Tentara Jepang mengumumkan pembentukan *Dokoritzu Junbi Iinkai*/Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (*Tjahaja*, 9 *Hachi Gatsu*/Agustus 2605/1945).

Berita tentang Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 dapat diketahui beberapa hari kemudian oleh masyarakat kota Garut secara umum. Bahkan lebih dari itu, melalui radio rahasia para pejuang, kekalahan Jepang kepada tentara Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 sudah tersebar luas di kalangan penduduk. Orang-orang Jepang Sakura (sipil) yang bekerja di perkebunan di luar Kota Garut yang sudah mengetahui berita tersebut segera meninggalkan Garut, bahkan mereka sebelumnya mempersilahkan kepada para penduduk untuk mengambil berbagai persediaan sandang dan pangan yang ada di gudang-gudang. Para pekerja itu berebutan mengambil bahan sandang, pangan, dan sebagainya. Akan tetapi, orang-orang Jepang

Sakura yang berada di Garut *Shoku Kusyo* (GSK) dan Tentara Jepang di Talun tidak memperdulikan berita kekalahan Jepang dan masih tetap bertahan. Pada saat itu, sambil menunggu kedatangan tentara Sekutu (Inggris), tugas keamanan di daerah Garut dan Indonesia pada umumnya diserahkan kepada tentara Jepang yang telah kalah perang.

Orang-orang Jepang Sakura yang berada di GSK, di bawah pimpinan Matsumoto, mengumumkan agar semua pekerja tetap bekerja seperti biasa dan menghimbau agar jangan mendengar berita dusta yang belum pasti. Melihat gelagat para pekerja yang mulai bersikap menentang dan tidak acuh maka pimpinan GSK mulai berhati-hati. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, pimpinan GSK meminta bantuan tentara untuk pengamanan. Pada 9 Oktober 1945, 60 serdadu Jepang di bawah pimpinan Kapten Nitoshi yang dilengkapi berbagai persenjataan termasuk persenjataan berat diantaranya dua *tekidanto* (mortir kecil) menjaga keamanan Pabrik Tenun Garut. Akan tetapi, atas desakan para pemuda yang bersenjata golok, diantaranya Uwes, Amung Makmun, Charly, Ahmad Marko, dan sebagainya, atas dukungan masyarakat Kota Garut berhasil berunding dan melucuti senjata para serdadu Jepang. Para pemuda pun akhirnya berhasil mengambil-alih GSK.

Menjelang 10 Oktober 1945 (*Catatan harian Yo Liang Kie* 1942-1945), para pemuda Garut yang mendengar berita tersebut segera menuju GSK dan berteriak "bunuh si benjol". Sebetulnya permintaan untuk membunuh para serdadu Jepang tersebut ditolak oleh Uwes, namun karena suasana makin panas dan tidak terkendali akibat rasa dendam terhadap tentara Jepang maka Uwes pun tidak bisa menahannya lagi. Akhirnya, pemuda di bawah pimpinan Sahlan membunuh semua serdadu Jepang yang dipimpin Kapten Nitoshi. Cara membunuhnya, mereka disuruh jongkok dan satu per satu lehernya dipotong oleh pedang samurai milik tentara Jepang. Orang yang turut serta membunuh tentara Jepang, selain Sahlan, juga Emin dan Ahmad Marko. Adapun orang-orang Jepang Sakura di bawah pimpinan Matsumoto selamat karena telah dibawa oleh Uwes ke perkebunan di daerah Cikajang.

Dua hari kemudian datang 57 kendaraan, termak 15 tank memuat 900 tentara Jepang dari Ujungberung (Bandung) menuju Garut yang berniat balas dendam atas kematian teman-temannya yang telah dibunuh secara sadis. Mereka memasuki Kota Garut setelah berhasil menghancurkan para pejuang yang menghadang dengan senjata seadanya di daerah Tarogong dan Haurpanggung. Tentara Jepang berhasil menewaskan 50 orang pejuang. Setelah memasuki Kota Garut mereka bertindak secara membabi buta, yaitu mengambil berbagai barang, wanita atau apa saja yang mereka inginkan. Tentu saja masyarakat Garut pun tidak tinggal diam dan berusaha untuk melawannya. Namun, pertempuran besar akhirnya dapat dihindarkan dengan mengadakan perundingan antara para pejuang Garut dan tentara Jepang di Pendopo Kabupaten. Pihak masyarakat diwakili

Bupati T. Kalih Wiriaatmadja, sedangkan tentara Jepang oleh Kolonel Akano dari Bandung. Dari hasil perundingan itu disepakati bahwa kedua belah pihak akan memelihara ketertiban daerah Garut secara umum dan pihak tentara Jepang pun boleh mengambil alih GSK. Pada 19 Oktober malam hari, para serdadu Jepang yang telah menguasai GSK berpura-pura berniat baik kepada penduduk, yaitu dengan cara membuka pintu gudang Pabrik Tenun Garut yang penuh dengan kain/tekstil. Mereka berteriak "*Indonesia ambil kain di gudang*". Tentu saja masyarakatpun yang sedang kekurangan bahan sandang segera berebut dan berdesak-desakkan mengambil kain. Namun, begitu masyarakat berada di dalam gudang, pintunya segera ditutup dan dikunci, lalu dibakar oleh Tentara Jepang. Ketika pagi hari pintu gudang dibuka secara paksa, tampak bertumpukan jenazah hangus di depan pintu. Korban jiwa sulit dihitung, tetapi perkiraan jumlah puluhan orang. Pasukan Jepang sendiri berhasil melarikan diri tanpa bisa dikejar (*Buana Minggu*, edisi 24 Maret 1985).

Tentu saja masyarakat Kota Garut, terutama para pemudanya marah. Mereka berniat membalas kekejaman tersebut kepada para tentara Jepang yang masih ada di Talun. Akan tetapi, karena persenjataan tidak seimbang bila dibandingkan dengan tentara Jepang maka niat tersebut tertunda sekitar satu minggu. Mereka memberitahukan masalahnya kepada para pejuang yang ada di Bandung, Yogyakarta, Semarang, Blitar dan Surabaya. Nampaknya, bantuan dari Yogyakarta, Semarang, Blitar, dan Surabaya lebih dulu tiba daripada Bandung. Baru pada 26 Oktober 1945 (*Catatan harian Yo Liang Kie* 1942-1945), sekitar pukul 05.00 (pagi), setelah datang bantuan pasukan, para pemuda Garut menyerang markas tentara Jepang. Meskipun mendapat bantuan, namun kekuatan tentara Jepang sangat kuat, karena selain bersenjata lengkap, juga markas tentara Jepang tersebut di depannya dikelilingi oleh lapangan terbuka dan pagar kawat berduri, sedangkan di belakangnya dikelilingi sawah dan juga pagar kawat berduri, sehingga apabila ada penyerang, dengan mudah tentara Jepang dapat menembaknya, baik yang berusaha masuk dari depan maupun dari Belakang. Para pejuang terus berusaha mengepung tentara Jepang. Tentara Jepang menyadari bahwa mereka tidak mungkin memenangkan pertempuran itu karena perbekalan atau bahan makanan tidak bisa mereka dapatkan. Mereka menyerah dan diakhiri dengan gencatan senjata sekitar pukul 08.00. Korban yang tewas dari pihak pemuda Garut yang dibantu pasukan dari Yogyakarta, Semarang, Blitar, dan Surabaya sekitar dua puluh orang, termasuk Komandan pasukan Blitar Soepeno, sedangkan dari pihak tentara Jepang tidak diketahui. Para jenazah dari Yogyakarta, Semarang, Blitar, dan Surabaya dibawa kembali ke tempat asalnya dengan kereta api melalui Stasiun Garut, sedangkan para korban yang berasal dari Garut dikuburkan di daerah Garut. Tentara Jepang baru angkat kaki dari Kota Garut pada awal November

setelah pasukan sekutu datang ke Kota Garut untuk melucuti senjata tentara Jepang. Dengan adanya peristiwa tersebut maka berakhirilah Pemerintah Pendudukan Tentara Jepang di Kabupaten Garut.

Meskipun masyarakat Garut sangat membenci orang-orang Jepang, namun tentara Jepang yang bergabung dengan pejuang di Garut diterima dengan baik. Ada tiga tentara Jepang yang bergabung dengan para pejuang di Garut dan masuk agama Islam. Setelah disunat namanya menjadi Umar, Usman, dan Ali. Pada masa Agresi Militer Belanda ke-2 (1948), mereka ditembak mati oleh tentara Belanda (Sofianto, 2001: 94).

SIMPULAN

Setelah penyerahan kekuasaan dari Pemerintah Kolonial Belanda kepada Pemerintah Pendudukan Jepang, tentara Jepang mulai memasuki Kota Bandung, mereka masuk dari arah Lembang dengan berjalan kaki. Masyarakat Bandung menyambut kedatangan tentara Jepang dengan penuh kegembiraan, karena Jepang dianggap sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa Indonesia dari cengkraman penjajahan Belanda. Hal yang menarik bagi rakyat Jawa Barat khususnya adalah gencarnya propaganda Tentara Jepang di Indonesia melalui radio yang berisi antara lain, janji-janji muluk tentang kemakmuran bersama di Asia Timur Raya.

Setelah Lembang sebagai benteng terakhir Belanda jatuh ke tangan tentara Jepang pada 7 Maret 1942 maka praktis Kota Bandung pun dapat dikuasai oleh tentara Jepang. Kemudian sekitar pertengahan bulan Maret tentara Jepang memasuki Kota Garut melalui Stasiun Cibat, Stasiun Garut, dan melalui jalan raya Tarogong dengan memakai kendaraan bermotor, sepeda dan bejalan kaki. Kedatangan Tentara Jepang tersebut disambut oleh rakyat Garut dengan penuh suka-cita. Masyarakat Garut berharap bahwa tentara Jepang dapat membebaskan penderitaan dari pemerintah Kolonial Belanda dan Tentara Jepang dapat memberikan kemerdekaan dan kesejahteraan kepada masyarakat Garut khususnya dan Indonesia umumnya. Setelah Tentara Pendudukan Jepang menguasai Kota Garut, kemudian mereka mengambil alih semua instansi, perusahaan, dan perkebunan milik Belanda, baik yang ada di dalam maupun di luar Kota Garut.

Di wilayah Garut, Pemerintah Tentara Jepang mengerahkan segala kegiatan ekonomi untuk kepentingan perang. Melalui unit-unit desa terkecil, rakyat diwajibkan mengumpulkan hasil bumi di antaranya padi, jagung dan buah-buahan. Para petani yang sebelumnya bebas menanam apa saja di tanah garapannya, harus menanam tanaman yang sesuai dengan ketetapan penguasa Jepang, dan hasilnya harus diserahkan untuk kepentingan peperangan. Tanah-tanah kosong di daerah Garut harus ditanami pohon *kaliki* (pohon jarak). Para penduduk yang mampu diminta sukarela atau secara paksa untuk menyumbangkan perhiasan berupa emas, perak, intan dan berlian untuk keperluan peperangan. Selama

Pendudukan Tentara Jepang, masyarakat Garut tidak saja menderita lahir, tetapi juga menderita batin.

Akibat tindakan Pemerintah Tentara Jepang tersebut, kehidupan ekonomi penduduk Garut menjadi sengsara. Untuk Memperoleh makanan pokok, para penduduk harus memiliki “kartu” dari kepala desa, kemudian ditukarkan dengan beras atau jagung (kualitas yang rendah) di desanya masing-masing, serta harus antri berjam-jam mendapatkan giliran. Untuk mengatasi kesulitan bahan makanan, terpaksa penduduk makan umbi-umbian, seperti *hui* (ubi jalar), *sampeu* (ketela pohon), *taleus* (talas), dan bahkan ada yang memakan *bodogol cau* (batang pokok pohon pisang). Oleh karena persediaan pangan sangat kurang, banyak penduduk Garut yang menderita kelaparan, kekurangan gizi, terkena penyakit kolera dan malaria yang sering mengakibatkan korban jiwa.

Selain sulit memperoleh bahan pangan, masyarakat Garut pun sulit memperoleh bahan sandang karena bahan itu sejak 1943 menghilang dari pasaran. Penduduk yang tidak mampu membeli bahan sandang pada masa itu memakai *kadut* (karung goni). Jenis pakaian itu hampir merata dipakai di mana-mana, terutama oleh penduduk di luar Kota Garut, bahkan penduduk Kota Garut pun banyak yang memakainya.

Pada awal masuknya tentara Jepang ke Kota Garut, masyarakat menyambut tentara Jepang dengan penuh antusias. Namun setelah tiga bulan, Tentara Jepang menampakkan kekejamannya sehingga masyarakat Garut mulai membenci tentara Jepang. Oleh karena Tentara Jepang sangat kuat maka masyarakat Garut pun harus bersabar menerima sepak terjang tentara Jepang yang sangat brutal. Namun, setelah masyarakat Garut mengetahui berita proklamasi kemerdekaan RI 1945 maka masyarakat pun mulai bernafas lega untuk membebaskan diri dari cengkraman Tentara Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

Anggapradja, Sulaeman, t.t. *Sejarah Garut dari Masa ke Masa*. Garut: Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Garut.

Asmadi. 1985. *Pelajar Pejuang*. Jakarta: Sinar Harapan.

Benda, Harry J. 1980. *Bulan Sabit dan Matahari Ter-*

bit: Islam di Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang. Jakarta: Pustaka Jaya.

Djajusman. 1978. *Hancurnya Angkatan Perang Hindia Belanda (KNIL)*. Cet.I, Bandung: Angkasa.

Drissen, Ernst. 1983. *Indische Foto's (1917-1942) van Thilly Weissenborn*. Amsterdam: Sijthoff.

Ekadjati, Edi S. 1980/1981. *et al. Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Barat*, Jakarta: Depdikbud Disjarahnitra.

Kartidirdjo, Sartono *et al.* 1977. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.

Nasution, A.H. 1977. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid I*. Cetakan ke-2. Bandung: Angkasa.

Notosusanto, Notosusanto. 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*. Jakarta: Yayasan Idayu.

Onghokham. 1989. *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta: Gramedia.

Panitia Penyusunan Sejarah Pemerintahan di Jawa Barat. 1991. *Sejarah Pemerintahan di Jawa Barat*. Bandung: Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sagimun M.D., dkk. 1985. *Perlawanan Rakyat Indonesia terhadap Fasisme Jepang*. Jakarta: Inti Idayu Press.

Salim, Makmun. 1971. *Ichisar Sedjarah Perang Dunia II: Seri Textsbook Sedjarah ABRI-C7*. Djakarta: Dephankam.

Sofianto, Kunto. 2001. *Garoet Kota Intan: Sejarah Lokal Kota Garut sejak Zaman Kolonial Belanda hingga Masa kemerdekaan*, Bandung: Alqaprint.

Taslimah A. Wahid, HJ. 1995. *Mubaligh Markazi Pertama Haji Abdul Wahid H.A.*, Parung: Pusdik Mubarak.